

2024



PENGADILAN NEGERI
SIBOLGA

LAPORAN KEUANGAN



098739

PERIODE 1 JANUARI 2024 – 30 JUNI 2024

Pengadilan Negeri Sibolga

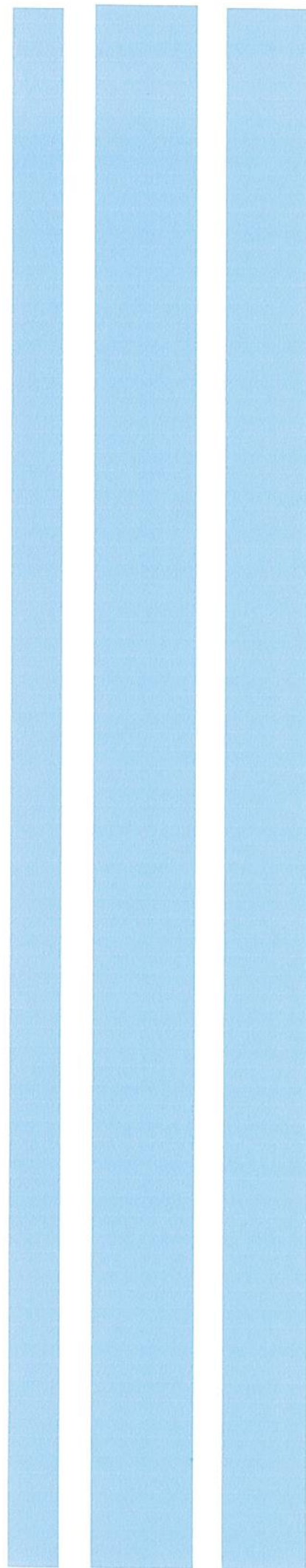
LAPORAN KEUANGAN

(098739)

Untuk Periode 1 Januari 2024 – 30 Juni 2024
Periode Semester I

Jl.Padang Sidempuan No.6

Sibolga – Sumatera Utara



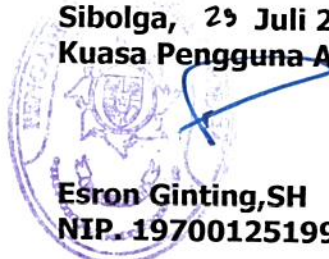
KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pengadilan Negeri Sibolga adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Sibolga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis aktual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Sibolga. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sibolga, 25 Juli 2024
Kuasa Pengguna Anggaran

Esron Ginting, SH
NIP. 197001251993031007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	1
Ringkasan	2
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	20
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	26
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	38
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	42
F. Pengungkapan Penting Lainnya	45
VI. Lampiran dan Daftar	48



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

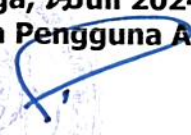
Jl. Padangsidempuan No. 6 Sarudik Kecamatan Sarudik
Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara 22611.
www.pn-sibolga.go.id, pnsibolga@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Sibolga yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Per 30 Juni 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sibolga, 15 Juli 2024
Kuasa Pengguna Anggaran


Esron Ginting, SH
NIP. 197001251993031007

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sibolga Periode Semester I Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 30 Juni 2024.

Realisasi Pendapatan Negara per 30 Juni 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.10.353.557,- atau mencapai 173 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 5.979.000,-

Realisasi Belanja Negara pada periode per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp.2.922.600.163,- atau mencapai 58 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 5.056.997.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada per 30 Juni 2024. Nilai Aset pada 30 Juni 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 17.068.126.343,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp.28.991.273,- Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.16.960.678.870,- dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 78.456.200,-

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 345.707.117,- dan Rp. 16.722.419.226,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/deficit dari operasi, surplus/deficit dari kegiatan non operasional, surplus/deficit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp. 14.277.247,- sedangkan

jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp. 3.511.108.821,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp.3.496.831.574,-). Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Surplus Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp.0,- dan sebesar Rp.0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp (Rp.3.496.831.574,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp. 17.306.369.194,- dikurangi Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp. 3.496.831.574,-) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 635.000,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 2.921.246.606,- sehingga Ekuitas entitas pada 30 Juni 2024 adalah senilai Rp. 16.722.419.226,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk 1 Januari – 30 Juni 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN NEGERI SIBOLGA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 30 Juni 2024

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0
I. Pendapatan Perpajakan	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	5.979.000,	10.353.557,	4.374.557,	173	3.110.000,	1.760.760,	1.349.240,	57,
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	5.979.000	10.353.557	4.374.557	173	3.110.000	1.760.760	1.349.240	57
III. Pendapatan Hibah	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	5.979.000,	10.353.557,	4.374.557,	173	3.110.000,	1.760.760,	1.349.240,	57,
B. Belanja Negara	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	5.056.997.000,	2.922.600.163,	(2.134.396.837,)	58	4.928.606.000,	2.792.760.147,	2.135.845.853,	57,
1. Belanja Pegawai	3.642.151.000	2.239.560.009	(1.402.590.991)	61	3.496.788.000	1.961.912.511	1.534.875.489	56
2. Belanja Barang	1.414.846.000	683.040.154	(731.805.846)	48	1.431.818.000	830.847.636	600.970.364	58
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	5.056.997.000,	2.922.600.163,	(2.134.396.837,)	58	4.928.606.000,	2.792.760.147,	2.135.845.853,	57,

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

PENGADILAN NEGERI SIBOLGA
NERACA
PER TAHUN 30 Juni 2024

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	24.000.000,	0	24.000.000	0,00
Piutang Bukan Pajak	2.321.273,	0	2.321.273	0,00
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	2.321.273,	0	2.321.273	0,00
Persediaan yang Belum Diregister	2.670.000,	0	2.670.000	0,00
JUMLAH ASET LANCAR	28.991.273,	0	28.991.273	
ASET TETAP				
Tanah	14.146.581.000,	14.146.581.000	0	0,00
Peralatan dan Mesin	1.925.874.310,	2.110.623.003	(184.748.693)	(8,75)
Gedung dan Bangunan	4.998.877.000,	4.998.877.000	0	0,00
Aset Tetap Lainnya	10.474.751,	10.474.751	0	0,00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(4.121.128.191,)	(4.020.536.318)	(100.591.873)	2,50
JUMLAH ASET TETAP	16.960.678.870,	17.246.019.436	(285.340.566)	(1,65)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	263.204.893,	78.456.200	184.748.693	235,48
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(184.748.693,)	0	(184.748.693)	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	78.456.200,	78.456.200	0	0,00
JUMLAH ASET	17.068.126.343,	17.324.475.636	(256.349.293)	(1,48)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	295.625.199,	16.504.025	279.121.174	1.691,23
Utang Yang Belum Ditagihkan	26.081.918,	0	26.081.918	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,	1.602.417	(1.602.417)	(100,00)
Uang Muka dari KPPN	24.000.000,	0	24.000.000	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	345.707.117,	18.106.442	327.600.675	1.809,30
JUMLAH KEWAJIBAN	345.707.117,	18.106.442	327.600.675	1.809,30
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	16.722.419.226,	17.306.369.194	(583.949.968)	(3,37)
JUMLAH EKUITAS	16.722.419.226,	17.306.369.194	(583.949.968)	(3,37)
JUMLAH EKUITAS	16.722.419.226,	17.306.369.194	(583.949.968)	(3,37)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	17.068.126.343	17.324.475.636	(256.349.293)	(1,48)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan

Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR PENGADILAN NEGERI SIBOLGA LAPORAN OPERASIONAL PER 30 Juni 2024

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0,	0,	0,	NaN
PENDAPATAN OPERASIONAL	0,	0,	0,	NaN
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	14.277.247,	7.137.908,	7.139.339,	100,02
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	14.277.247,	7.137.908,	7.139.339,	100,02
Jumlah Pendapatan	14.277.247,	7.137.908,	7.139.339,	100,02
BEBAN OPERASIONAL	0,	0,	0,	NaN
Beban Pegawai	2.491.071.208,	2.169.718.392,	321.352.816,	14,811
Beban Persediaan	22.544.000,	30.416.500,	(7.872.500),	(25,882)
Beban Barang dan Jasa	427.150.904,	463.311.351,	(36.160.447),	(7,805)
Beban Pemeliharaan	232.733.743,	365.813.210,	(133.079.467),	(36,379)
Beban Perjalanan Dinas	52.268.400,	36.192.674,	16.075.726,	44,417
Beban Penyusutan dan Amortisasi	285.340.566,	269.407.466,	15.933.100,	5,914
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0,	0,	0,	NaN
Beban Transfer	0,	0,	0,	NaN
Beban Lain-Lain	0,	0,	0,	NaN
JUMLAH BEBAN	3.511.108.821,	3.334.859.593,	176.249.228,	5,285
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(3.496.831.574,)	(3.327.721.685,)	(169.109.889,)	5,082
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,	0,	0,	NaN
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,	0,	0,	NaN
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(3.496.831.574,)	(3.327.721.685,)	(169.109.889,)	5,082
POS LUAR BIASA	0,	0,	0,	NaN
Beban Luar Biasa	0,	0,	0,	NaN
POS LUAR BIASA	0,	0,	0,	NaN
SURPLUS/DEFISIT - LO	(3.496.831.574,)	(3.327.721.685,)	(169.109.889,)	5,082

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR PENGADILAN NEGERI SIBOLGA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PER 30 Juni 2024

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	17.306.369.194,	17.246.008.978,	60.360.216,	0,35
SURPLUS/DEFISIT-LO	(3.496.831.574,)	(3.327.721.685,)	(169.109.889,)	5,08
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	635.000,	0,	635.000,	0,
SELISIH REVALUASI ASET	0,	0,	0,	0,
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0,	0,	0,	0,
LAIN-LAIN	635.000,	0,	635.000,	0,
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	2.912.246.606,	2.808.368.137,	103.878.469,	3,7
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(583.949.968,)	(519.353.548,)	(64.596.420,)	12,44
EKUITAS AKHIR	16.722.419.226,	16.726.655.430,	(4.236.204,)	(0,03)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pengadilan Negeri Sibolga

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Visi Pengadilan Negeri Sibolga adalah bagian dari rencana strategis Mahkamah Agung dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Pengadilan Negeri Sibolga mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan Negeri Sibolga.

Visi Pengadilan Negeri Sibolga adalah **“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA YANG AGUNG”**, yang bertujuan agar Pengadilan Negeri Sibolga menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Pengadilan Negeri Sibolga adalah

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sibolga.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Sibolga.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Sibolga.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Sibolga melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pengadilan yang mandiri dan indenpenden, bebas dari campur tangan pihak lain dan transparan.
2. Mewujudkan peradilan yang efektif, efesien, bermartabat, berwibawa dan dihormati.
3. Mewujudkan kualitas pelayanan hukum secara prima kepada masyarakat pencari keadilan.
4. Mewujudkan profesional kinerja aparat Pengadilan Negeri Sibolga.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor . Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Pengadilan Negeri Sibolga menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar
Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pengadilan Negeri Sibolga dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan
Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pengadilan Negeri Sibolga. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sibolga adalah sebagai berikut

Pendapatan-
LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-
LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas

dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%

Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk

dilakukan penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KM.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang
Jangka
Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

AsetLainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset

tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70
------------------------------	----

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Pengadilan Negeri Sibolga telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi dan adanya perubahan rencana penarikan pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

URAIAN	TA 2023	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
1	2	3
PENDAPATAN	0	0
PENDAPATAN PNBP	3.110.000	3.110.000
JUMLAH PENDAPATAN	3.110.000	3.110.000
Belanja		
Belanja Pegawai	3.496.788.000	3.496.788.000
Belanja Barang	1.431.818.000	1.431.818.000
Belanja Modal	0	567.143.000
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	4.928.606.000	5.495.749.000

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan
Rp.16.640.240,-

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 16.640.240,- atau mencapai 535 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.3.110.000,-. Rincian pendapatan Pengadilan Negeri Sibolga dapat dilihat sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

URAIAN	31 Desember 2023		
	Estimasi Pendapatan	Realisasi	% Real Anggaran
1	2	3	4
Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	3.110.000	7.940.241	0%
Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin	0	8.699.999	0%
Penerimaan kembali belanja pegawai tahun lalu	0	0	0%
Jumlah	3.110.000	16.640.240	535%

Realisasi Belanja
Negara Rp.
3.806.857.287,-

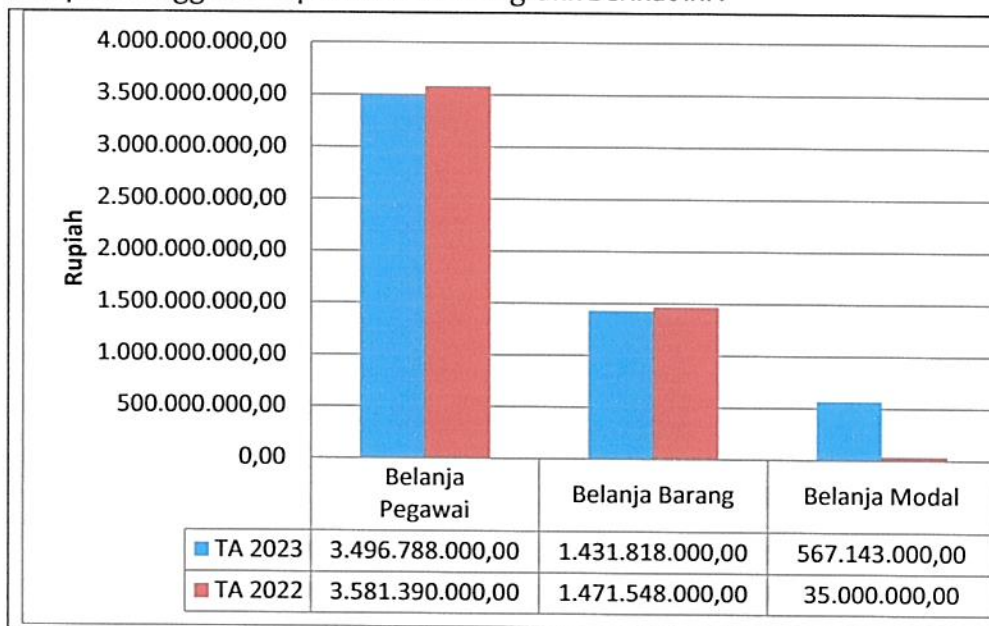
B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 5.406.168.946,- atau 98% dari anggaran belanja sebesar Rp. 5.495.749.000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja periode yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode yang berakhir 31 Desember 2023

URAIAN	TA periode yang berakhir 31 Desember 2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Anggaran
1	2	3	4
Belanja Pegawai	3.496.788.000	3.439.320.516	98%
Belanja Barang	1.431.818.000	1.403.436.868	98%
Belanja Modal	567.143.000	563.411.580	99%
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00%
Total Belanja Kotor	5.495.749.000	5.406.168.964	98%
Pengembalian	0	0	0,00%
Jumlah	5.495.749.000	5.406.168.964	98%

Komposisi anggaran dapat dilihat dalam grafik berikut ini :



B.3 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Rp.
3.439.320.516,-

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan TA 2022 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.439.320.516,- dan Rp. 3.567.788.839,-. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2023 Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan TA 2022 Periode Yang Berakhir 31 Desember 2022

Uraian	TA 2023 Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023	TA 2022 Periode Yang Berakhir 31 Desember 2022
Belanja Gaji dan Tunj.PNS	3.159.096.516	3.316.476.839
Belanja Uang Makan	280.224.000	251.312.000
Belanja Uang Lembur	0	0
Total Belanja Kotor	3.439.320.516	3.567.788.839
Pengembalian	0	0
Jumlah	3.439.320.516	3.567.788.839

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang Rp.
1.403.436.868,-

Realisasi Belanja Barang TA 2023 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan TA 2022 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.403.436.868,- dan Rp. 1.468.786.171,-.

Perbandingan Belanja Barang TA 2023 Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan TA 2022 Periode Yang Berakhir 31 Desember 2022

Uraian	TA 2023 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023	TA 2022 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022
Belanja Barang Operasional	673.161.646	642.007.000
Belanja Barang Non Operasional	7.360.000	5.000.000
Belanja Jasa	187.935.416	303.720.000
Belanja Pemeliharaan	465.217.182	448.821.000

Belanja Perjalanan Dinas	76.122.624	74.000.000
Total Belanja Kotor	1.403.436.868	1.468.786.171
Pengembalian Belanja	0	0
Jumlah	1.403.436.868	1.468.786.171

B.5 Belanja Modal

Belanja Modal Rp.
563.411.580,-

Realisasi Belanja Modal TA 2023 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan TA 2022 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 563.411.580,- dan Rp. 35.000.000,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2023 Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan TA 2022 Periode Yang Berakhir 31 Desember 2022

Uraian	TA 2023 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023	TA 2022 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022
Belanja Modal Tanah	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	563.411.580	35.000.000
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-
Belanja jalan,Irigasi dan Jaringan	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-
Jumlah Belanja Kotor	563.411.580	35.000.000
Pengembalian Belanja	-	-
Jumlah Belanja	563.411.580	35.000.000

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan TA 2022 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Hal ini Belanja Modal Tanah tidak ada di anggarkan.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2023 Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan TA 2022 Periode Yang Berakhir 31 Desember 2022

Uraian Jenis Belanja	TA 2023 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023	TA 2022 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022
Belanja Modal Tanah	-	-

Belanja Modal Pembebasan Tanah	-	-
B.Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	-	-
Belanja Modal Pembuatan Serifikat Tanah	-	-
Belanja Modal Pengukuran Tanah	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-
Pengembalian Belanja Modal	0	0
Jumlah Belanja	-	-

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 563.411.580,- dan dan TA 2022 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 adalah Rp. 35.000.000,-

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan TA 2022 Periode Yang Berakhir 31 Desember 2022

Uraian Jenis Belanja	TA 2023 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023	TA 2022 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022
Pengadaan Komputer unit/Laptop	0	0
Peralatan Komputer	0	10.000.000
Pengadaan meubilier	0	25.000.000
Pengadaan Genset	532.245.000	-
Pengadaan Perangkat cctv	31.166.580	-
Jumlah Belanja Kotor	0	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-
Jumlah Belanja	563.411.580	35.000.000

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan TA 2022 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 tidak ada di anggarkan.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2023 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan TA 2022 untuk
periode yang berakhir 31 Desember 2022*

Uraian Jenis Belanja	TA 2023 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023	TA 2022 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022
Gedung Tempat kerja	-	-
	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-
Pengembalian Belanja Modal	0	0
Jumlah Belanja	-	-

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2023 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan TA 2022 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp. 0,-.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2023 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan TA 2022 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022

Uraian Jenis Belanja	TA 2023 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023	TA 2022 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022
Belanja Modal Jaringan	-	-
B.Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-
Jumlah Belanja	0	0

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2023 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan TA 2022 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2023 Nihil. Hal ini disebabkan karena tidak ada di anggarkan di TA 2023 dan TA 2022

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp .0,-

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Periode per tanggal 30 Juni 2024 Rp.0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

Keterangan	30 Juni 2024	30 Juni 2023
Uang Tunai	24.000.000	0
Kwitansi UP	0	0
Bank BRI Cab.Sibolga	0	0
Jumlah Belanja	24.000.000	0

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0,-

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Periode 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp0,- Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

Keterangan	30 Juni 2024	30 Juni 2023
Uang Tunai	-	-
Bank BRI Cab.Sibolga	-	-
Jumlah Belanja	-	-

C.3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih -
Piutang Perpajakan
Rp0,-

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan Periode 30 Juni 2024 sebesar Rp0,-. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

Keterangan	30 Juni 2024	30 Juni 2023
Kas Lain d Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lain d Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya dari Hibah	-	-
Jumlah	-	-

C.4 Piutang PNBP

Piutang PNBP
Rp.2.321.273,-

Saldo Piutang PNBP Periode per tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp. 2.321.273,-. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBP per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

Keterangan	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022
Piutang PNBP	2.321.273	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	2.321.273	-

C.5 Persediaan.

Persediaan Rp.
28.203.000,-

Nilai Persediaan per per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp. 28.203.000 Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Terdapat persediaan yang belum diregister dengan penjelasan merupakan pencatatan BAST pada modul komitmen dibulan Juni di aplikasi SAKTI yang belum dilakukan pertanggungjawaban pada modul pembayaran maupun pendetailan pada modul persediaan.

Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp0,-

C.6 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

No	Nama	30 Juni 2024	30 Juni 2023
	Nihil	-	-
		-	-
		-	-
	Jumlah	-	-

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 dan masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Bagian Lancar TPA
Rp0,-

Rincian Bagian Lancar TPA per tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

No	Nama	30 Juni 2024	30 Juni 2023
	Nihil	-	-
		-	-
		-	-
	Jumlah	-	-

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 30 Juni 2024 dan

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Lancar
Rp0,-

30 Juni 2023 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar Per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

Kualitas Piutang	Nilai Piutang JK Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah			
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah			
Jumlah Penyisihan Piutang Tak tertagih	-	-	-

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Belanja Dibayar di
Muka Rp0,-

Saldo Belanja Dibayar di Muka per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

No	Nama	30 Juni 2024	30 Juni 2023
1	Belanja Gaji Pokok PNS	-	-
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	-	-
3	Belanja Tunj.Suami/Isteri PNS	-	-

4	Belanja Tunj. Anak PNS	-	-
Jumlah		-	-

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang
Masih Harus Diterima
Rp0,-

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

No	Jenis	30 Juni 2024	30 Juni 2023
	Nihil	-	-
		-	-
		-	-
Jumlah		-	-

C.10 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tagihan TP/TGR
Rp0,-

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Tagihan TP Per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

No	Debitur	30 Juni 2024	30 Juni 2023
	Nihil	-	-
		-	-
		-	-
Jumlah		-	-

Tagihan Penjualan
Angsuran
Rp0,-

C.11 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2024

No	Debitur	30 Juni 2024	30 Juni 2024
	Nihil	-	-
		-	-
		-	-
	Jumlah	-	-

C.12 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp0,-

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang
Per 30 Juni 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang JK Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah			
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	-	-

Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah			
Jumlah Penyisihan Piutang Tak tertagih	-	-	-

C.13 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pengadilan Negeri Sibolga per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 14.146.581.000,- dan Rp 14.146.581.000,-. Tidak ada mengalami Mutasi Tambah ataupun Kurang. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tanah

Rp. 14.146.581.000,-

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2024	14.146.581.000
Mutasi Tambah	0
Pembelian	0
Mutasi Kurang	0
Penyitaan Pengadilan	-
Saldo per 30 Juni 2024	14.146.581.000

C.14 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah Rp. 1.925.874.310,- dan Rp. 2.110.623.003,-. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Peralatan dan Mesin

Rp. 1.925.874.310,-

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	2.110.623.003
Mutasi Tambah	
Pembelian	0
Transfer Masuk	0
Hibah Barang	0
Penggunaan Kembali	0
Mutasi Kurang	-
Penghentian dari Pengguna	(0)
Saldo per 30 Juni 2024	1.925.874.310
Akumulasi Penyusutan	(1.191.786.832)
Nilai Buku per 30 Juni 2024	734.087.478

C.15 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah Rp 4.988.877.000,- dan Rp 4.899.492.000,- Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Gedung dan

Bangunan

Rp.4.988.877.000,-

Saldo Nilai Perolehan per 31 Des 2023	4.988.877.000
Mutasi Tambah	-
Pembelian/Pembangunan	-

Mutasi Kurang	-
Saldo per 30 Juni 2024	4.988.877.000
Akumulasi Penyusutan	(2.929.341.359)
Nilai Buku per 30 Juni 2024	2.069.535.641

C.16 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp.0,-

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp. 0,-. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	0
Mutasi Tambah	0
Penambahan Jaringan Listrik	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2024	0
Akumulasi Penyusutan	0
Nilai Buku per 30 Juni 2024	0

C.17 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya Rp 10.474.751,-

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah Rp 10.474.751,- dan Rp 10.474.751,-. Aset tetap tersebut berupa Bahan Perpustakaan Tercetak. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2023	10.474.751
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2024	10.474.751
Akumulasi Penyusutan	0
Nilai Buku per 30 Juni 2024	10.474.751

C.18 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-, untuk per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 ini tidak ada pengerjaan Pembangunan Gedung Kantor.

C.19 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing Rp. 4.121.128.191,- dan Rp 4.020.536.318,-. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 JUNI TA 2024

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	1.925.874.310	1.191.786.832	734.087.478
2	Gedung dan Bangunan	4.988.877.000	2.929.341.359	2.069.535.641
3	Jalan,Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	10.474.751	0	10.474.751
	Jumlah	6.925.226.061	4.121.128.191	2.814.097.870

C.20 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah Rp0,- dan Rp0,-. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Pengadilan Negeri Sibolga berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2023		-
Mutasi Tambah		-
		-
Mutasi Kurang		-
		-
Saldo per 30 Juni 2024		-
Akumulasi Penyusutan		-

Nilai Buku per 30 Juni 2024	-
-----------------------------	---

C.21 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain Rp
263.204.893,-

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah Rp 263.204.893,- dan Rp 78.456.200,-. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Des 2023	78.456.200
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2024	263.204.893
Akumulasi Penyusutan	184.748.693
Nilai Buku per 30 Juni 2024	78.456.200

C.22 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya (Rp .
184.748.693,-)

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing Rp .(184.748.693),- dan Rp. 0,- Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
	Aset Tak Berwujud	-	-	-
	Jumlah	-	-	-
	Aset Lain-lain	263.204.893	(184.748.693)	78.456.200
	Jumlah	263.204.893	(184.748.693)	78.456.200

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Uang Muka dari KPPN
Rp. 24.000.000,-

C.23 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing sebesar Rp. 24.000.000,- dan Rp.0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp. 295.625.199,-

C.24 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing sebesar Rp. 295.625.199,- dan Rp. 16.504.025,- Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Kantor Pengadilan Negeri Sibolga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023
1	Belanja Pegawai yang masih harus dibayar	267.025.199	16.504.025
2	Belanja barang yang masih harus dibayar	28.000.000	
	Jumlah	295.625.199	16.504.025

C.25 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima
di Muka
Rp. 0,-

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 1.602.417,-. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Sampai pelaporan ini dibuat Pendapatan Diterima Dimuka Nilainya Rp. 0,-

Rincian Pendapatan diterima dimuka

Uraian	Jumlah
	Rp. 0,-
	-
	-
Total	Rp.1,602,417,-

Beban Yang Masih
Harus Dibayar Rp0,-

C.26 Beban Yang Masih Harus Dibayar

Beban Yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 sebesar Rp0,- dan Rp0,-, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

Uraian	31 Desember 2021	31 Des 2020
Nihil	-	-
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

C.27 Ekuitas

Ekuitas
Rp. 16.722.419.226,-

Ekuitas per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 16.722.419.226,- dan Rp. 17.306.369.194,- Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp 14.227.247,- dan Rp 7.137.908,- Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	% Naik (Turun)
1	2	3	4
Pendapatan sewa tanah dan bangunan	14.227.247	7.137.908	100.02%
Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji	0	0	0%
Penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu	0	0	0%
Jumlah	14.227.247	7.137.908	100.02%

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.491.071.208,- dan Rp. 2.169.718.392,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai pada 30 Juni 2024

NO.	URAIAN JENIS BEBAN	30 Juni 2024
1	Beban Gaji dan Tunj.PNS	2.401.879.208
2	Beban Uang Makan PNS	89.192.000
3	Beban Lembur	0
4	Beban Tunj.Khusus & Beban Pegawai Transito	0
Jumlah		2.491.071.208

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan Rp
22.544.000,-

Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 22.544.000,- dan Rp 30.416.500,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

NO.	URAIAN JENIS BEBAN	30 Juni 2024	30 Juni 2023	Naik (Turun)%
1	Beban Persediaan Konsumsi	22.544.000	30.416.500	(25.882)
2	Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	-
3	Beban Persediaan pita,cukai,materai dan Leges	-	-	-
4	Beban Persediaan Barang Hasil Sitaan	-	-	-
5	Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah		22.544.000	30.416.500	(25.882)

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan
Jasa Rp.
427.150.904,-

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 427.150.904,- dan Rp. 463.311.351,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan
Rp. 232.733.743,-

Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 232.733.743,- dan Rp. 365.813.210,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Peningkatan beban pemeliharaan karena Besarnya Reliasasi pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor.

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan
Dinas Rp 52.268.400,-

Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 52.268.400,- dan Rp. 36.192.674,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat
Rp0,-

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial
Rp0,-

Beban Bantuan Sosial per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan
dan Amortisasi Rp
285.340.566,-

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 285.340.566,- dan Rp. 269.407.466,-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp0,-

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidak tertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

D.11 Kegiatan Non Operasional

Surplus dari Kegiatan
Non Operasional Rp.
0,-

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2022

NO.	URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun)%
1	Pendapatan pelepasan aset non lancar	0	0	0
2	Penjualan Alat Kantor	0	0	00.00
3	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	00.00
4	Pendapatan dari kegiatan non operasional	0	0	00.00
5	Beban dari kegiatan non operasional	0	0	00.00
Jumlah		0	0	0

**) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp.
17.246.008.978

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 1 Januari 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 17.306.369.194,- dan Rp. 17.246.008.978,-

Defisit LO
Rp. (3.496.831.574)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. (3.496.831.574) dan Rp. (3.327.721.685). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai Aset
Rp0,-

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan
Rp0,-

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Selisih Revaluasi Aset
Tetap Rp0,-

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp 0,-.

Koreksi Aset Tetap Non
Revaluasi Rp. 0,-

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp 0,-. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap terhadap penyesuaian akumulasi penyusutan setelah dilakukan koreksi data asset berupa koreksi pencatatan, koreksi nilai tambah, dan reklasifikasi keluar/masuk, sesuai dengan surat keterangan koreksi pencatatan nomor : 1/SEK.PN.W2-U9/SKET.PL1.2.5/IX/2023.

E.3.5 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain Rp.
635.000,-

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 635.000,- dan Rp 0,-. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi ini dilakukan jurnal manual atas koreksi kesalahan jurnal penyesuaian khusus belanja pengiriman surat dinas pos pusat.

E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas
Rp. 2.912.246.606,-

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 2.912.246.606,- dan Rp 2.808.368.137,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2024 DDEL sebesar Rp (10.353.557) sedangkan 30 Juni 2024 DKEL sebesar 2.922.600.163,-.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN transfer masuk sampai dengan 30 Juni 2024 sebesar Rp. 0,- Tidak terdapat transfer keluar dari Pengadilan Negeri Sibolga sampai dengan periode pelaporan per 30 Juni 2024.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 30 Juni 2024 sebesar Rp0,- dari total Rp0,- yang diterima per 30 Juni 2024.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah Rp0.

Ekuitas Akhir Rp.
16.722.419.226,-

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 16.722.419.226,- dan Rp. 16.726.655.430,-.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Pada tanggal berakhirnya 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 sampai Pelaporan Calk terdapat Kejadian-kejadian penting setelah tanggal Neraca. Yakni :

F.2 Temuan dan Tindak Lanjut BPK

Tidak terdapat temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK untuk laporan keuangan yang berakhir 30 Juni 20240 .

F.3 Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional lingkup Pengadilan Negeri Sibolga sampai dengan Per 30 Juni 2024 sebanyak 3 rekening dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekening Bendahara Pengeluaran.

No.	Nama Rekening	Nomor Rekening	Nilai
1	BPG 106 PN SIBOLGA BADAN URUSAN ADM	653250987391000	0
2	BPG 106 PN SIBOLGA BADAN PERADILAN UMUM	654440992031000	9.998.000

2. Rekening Pemerintah Lainnya.

No.	Nama Rekening	Nomor Rekening	Nilai
1	RPL 106 PN SIBOLGA UTK PDT	00383-01-30-000052-8	226.967.333,00

Daftar rekening Bendahara Pengeluaran dan Rekening Pemerintah Lainnya berupa rekening biaya perkara terlampir dalam Laporan Pendukung.

F.4 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

a. REVISI DIPA

Hingga Berakhirnya periode 30 Juni 2024 hal Revisi DIPA 01 Pengadilan Negeri Sibolga terlaksana sebanyak 4 kali revisi baik revisi halaman 3 DIPA .

b. RALAT SPM,SSBP dan SSPB

Sampai berakhirnya periode 30 Juni 2024 tidak terdapat ralat SPM .

LAMPIRAN

DAFTAR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN DAN REKENING PEMERINTAH LAINNYA:

NO	NO REKENING	Kategori
1.	653250987391000 BPG 106 PN SIBOLGA BADAN URUSAN ADM (BRI Cab.Sibolga)	Bendahara Pengeluaran
2.	654440992031000 BPG 106 PN SIBOLGA BADAN PERADILAN UMUM (BRI Cab.Sibolga)	Bendahara Pengeluaran
3.	00383-01-30-000052-8 RPL 106 PN SIBOLGA UTK PDT (BTN Kantor Cabang Pembantu Sibolga)	Rekening Pemerintah Lainnya

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SIBOLGA 098739

Tgl Data : 22/07/24 6:24 AM
Tgl Cetak : 22/07/24 10:16 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024					2023				
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%		
1	2	4	5	6	7	8	9	10		
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0		
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0		
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0		
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0		
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0		
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0		
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0		
c. Dana Kelistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0		
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0		
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	5.056.997,000	2.922.600,163	(2.134.396,837)	58	4.928.606,000	2.792.760,147	2.135.845,853	57		
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0		

Keterangan :
FINAL



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : (098739) PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

Tgl Data : 22/07/24 6:21 AM

Tgl Cetak : 22/07/24 10:16 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	17,306,369,194	17,246,008,978	60,360,216	0.35
SURPLUS/DEFISIT-LO	(3,496,831,574)	(3,327,721,685)	(169,109,889)	5.08
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	635,000	0	635,000	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	635,000	0	635,000	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	2,912,246,606	2,808,368,137	103,878,469	3.7
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(583,949,968)	(519,353,548)	(64,596,420)	12.44
EKUITAS AKHIR	16,722,419,226	16,726,655,430	(4,236,204)	(0.03)

Keterangan :

FINAL

SIBOLGA, 22 Juli 2024

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ESRON GINTING, S.H.

197001251993031007



LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 30 JUNI 2024
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
 SATUAN KERJA : (098739) PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

Tgl Data : 22/07/24 6:24 AM
 Tgl Cetak : 22/07/24 10:14 AM
 Halaman : 1
 lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	14,277,247	7,137,908	7,139,339	100.02
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	14,277,247	7,137,908	7,139,339	100.02
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	14,277,247	7,137,908	7,139,339	100.02
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	2,491,071,208	2,169,718,392	321,352,816	14.811
Beban Persediaan	22,544,000	30,416,500	(7,872,500)	(25.882)
Beban Barang dan Jasa	427,150,904	463,311,351	(36,160,447)	(7.805)
Beban Pemeliharaan	232,733,743	365,813,210	(133,079,467)	(36.379)
Beban Perjalanan Dinas	52,268,400	36,192,674	16,075,726	44.417
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 30 JUNI 2024
 (DALAM RUPIAH)



DEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
 SATUAN KERJA : (098739) PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

Tgl Data : 22/07/24 6:24 AM

Tgl Cetak : 22/07/24 10:14 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	285,340,566	269,407,466	15,933,100	5.914
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	3,511,108,821	3,334,859,593	176,249,228	5.285
URPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(3,496,831,574)	(3,327,721,685)	(169,109,889)	5.082
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
URPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(3,496,831,574)	(3,327,721,685)	(169,109,889)	5.082
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
RPLUS/DEFISIT - LO	(3,496,831,574)	(3,327,721,685)	(169,109,889)	5.082

eterangan :

INAL

SIBOLGA, 22 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



ESRON GINTING, S.H.
197001251993031007

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
 SATUAN KERJA : (098739) PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

Tgl Data : 22/07/24 6:21 AM
 Tgl Cetak : 22/07/24 10:17 AM
 Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	24,000,000	0	24,000,000	0.00
Piutang Bukan Pajak	2,321,273	0	2,321,273	0.00
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	2,321,273	0	2,321,273	0.00
Persediaan yang Belum Diregister	2,670,000	0	2,670,000	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	28,991,273	0	28,991,273	
ASET TETAP				
Tanah	14,146,581,000	14,146,581,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	1,925,874,310	2,110,623,003	(184,748,693)	(8.75)
Gedung dan Bangunan	4,998,877,000	4,998,877,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	10,474,751	10,474,751	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(4,121,128,191)	(4,020,536,318)	(100,591,873)	2.50
JUMLAH ASET TETAP	16,960,678,870	17,246,019,436	(285,340,566)	(1.65)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	263,204,893	78,456,200	184,748,693	235.48
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(184,748,693)	0	(184,748,693)	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	78,456,200	78,456,200	0	0.00
JUMLAH ASET	17,068,126,343	17,324,475,636	(256,349,293)	(1.48)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	295,625,199	16,504,025	279,121,174	1,691.23
Utang Yang Belum Ditagihkan	26,081,918	0	26,081,918	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka	0	1,602,417	(1,602,417)	(100.00)
Uang Muka dari KPPN	24,000,000	0	24,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	345,707,117	18,106,442	327,600,675	1,809.30
JUMLAH KEWAJIBAN	345,707,117	18,106,442	327,600,675	1,809.30
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	16,722,419,226	17,306,369,194	(583,949,968)	(3.37)
JUMLAH EKUITAS	16,722,419,226	17,306,369,194	(583,949,968)	(3.37)
JUMLAH EKUITAS	16,722,419,226	17,306,369,194	(583,949,968)	(3.37)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	17,068,126,343	17,324,475,636	(256,349,293)	(1.48)

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : (098739) PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

Tgl Data : 22/07/24 6:21 AM
Tgl Cetak : 22/07/24 10:17 AM
Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif_poc

Keterangan :
FINAL

SIBOLGA, 22 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ESRON GINTING, S.H.
197001251993031007

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : (098739) PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

Tgl Data : 22/07/24 6:24 AM

Tgl Cetak : 22/07/24 10:18 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	103,538,767	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	181,801,799	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	22,544,000	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	5,659,000	0
JUMLAH			24,895,465,605	24,895,465,605

Keterangan :

FINAL

SIBOLGA, 22 Juli 2024

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



ESRON GINTING, S.H.

197001251993031007

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA

SATUAN KERJA : (098739) PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

Tgl Data : 22/07/24 6:24 AM

Tgl Cetak : 22/07/24 10:18 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	24,000,000	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	2,321,273	0
0.0	117911	Persediaan yang belum diregister	2,670,000	0
0.0	131111	Tanah	14,146,581,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	1,925,874,310	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	4,998,877,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	10,474,751	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	1,191,786,832
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	2,929,341,359
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	263,204,893	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	184,748,693
0.0	212111	Beban pegawai yang masih harus dibayar	0	267,025,199
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	28,600,000
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	26,081,918
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	24,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	2,922,600,163
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	10,353,557	0
0.0	391111	Ekuitas	0	17,306,369,194
0.0	391119	Koreksi Lainnya	0	635,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	14,277,247
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	946,442,420	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	13,077	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	71,729,444	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	18,242,680	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	23,400,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1,127,950,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	144,795,147	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	53,011,440	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	89,192,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	16,295,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	323,622,152	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	18,280,000	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	1,248,752	0
3.0	522141	Beban Sewa	84,000,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	126,483,350	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	66,363,475	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	34,227,918	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	52,268,400	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA

SATUAN KERJA : (098739) PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

Tgl Data : 22/07/24 6:21 AM

Tgl Cetak : 22/07/24 10:19 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	2,922,600,163
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	10,353,557	0
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	10,353,557
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	838,502,140	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	12,443	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	63,691,228	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	16,299,748	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	20,800,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,000,200,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	133,816,185	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	47,073,000	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	104,706,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	14,460,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	292,672,152	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	18,280,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	28,203,000	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	1,603,777	0
3.0	522141	Belanja Sewa	84,000,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	126,483,350	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	66,363,475	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	25,546,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	39,888,400	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	735
JUMLAH			2,932,954,455	2,932,954,455

Keterangan :

FINAL

SIBOLGA, 22 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ESRON GINTING, S.H.
197001251993031007

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : null
SATUAN KERJA : 098739
JENIS SATUAN KERJA : KD

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
SUMATERA UTARA
PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

Kode Lap : LRA.B.S.1
 Tanggal : 22/07/24 10:20 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_sgo_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretaratan Pengadilan							
EBA	null							
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1,463,448,000	1,463,448,000	838,502,140	0	838,502,140	57.3	624,945,860
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	22,000	22,000	12,443	735	11,708	53.22	10,292
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	94,746,000	94,746,000	63,691,228	0	63,691,228	67.22	31,054,772
511121	Belanja Tunj. Suami/istri PNS	24,610,000	24,610,000	16,299,748	0	16,299,748	66.23	8,310,252
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	36,400,000	36,400,000	20,800,000	0	20,800,000	57.14	15,600,000
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	1,493,100,000	1,493,100,000	1,000,200,000	0	1,000,200,000	66.99	492,900,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	112,046,000	112,046,000	133,816,185	0	133,816,185	119.43	(21,770,185)
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	78,069,000	78,069,000	47,073,000	0	47,073,000	60.3	30,996,000
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	314,160,000	314,160,000	104,706,000	0	104,706,000	33.33	209,454,000
511129	Belanja Uang Makan PNS	25,550,000	25,550,000	14,460,000	0	14,460,000	56.59	11,090,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	3,642,151,000	3,642,151,000	2,239,560,744	735	2,239,560,009	61.49	1,402,590,991
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	3,642,151,000	3,642,151,000	2,239,560,744	735	2,239,560,009	61.49	1,402,590,991
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	3,642,151,000	3,642,151,000	2,239,560,744	735	2,239,560,009	61.49	1,402,590,991
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional	653,513,000	653,513,000	292,672,152	0	292,672,152	44.78	360,840,848
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	120,000	120,000	0	0	0	0	120,000
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	43,872,000	43,872,000	18,280,000	0	18,280,000	41.67	25,592,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	3,860,000	3,860,000	0	0	0	0	3,860,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	701,365,000	701,365,000	310,952,152	0	310,952,152	44.34	390,412,848
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	701,365,000	701,365,000	310,952,152	0	310,952,152	44.34	390,412,848
5218	Belanja Barang Persediaan	60,020,000	60,020,000	28,203,000	0	28,203,000	46.99	31,817,000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	60,020,000	60,020,000	28,203,000	0	28,203,000	46.99	31,817,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	60,020,000	60,020,000	28,203,000	0	28,203,000	46.99	31,817,000
5221	Belanja Jasa	8,400,000	8,400,000	0	0	0	0	8,400,000
522112	Belanja Langganan Telepon	19,200,000	19,200,000	1,603,777	0	1,603,777	8.35	17,596,223
522113	Belanja Langganan Air	89,400,000	89,400,000	84,000,000	0	84,000,000	93.96	5,400,000
522141	Belanja Sewa	117,000,000	117,000,000	85,603,777	0	85,603,777	73.17	31,396,223
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	117,000,000	117,000,000	85,603,777	0	85,603,777	73.17	31,396,223
5231	Belanja Pemeliharaan	246,091,000	246,091,000	126,483,350	0	126,483,350	51.4	119,607,650
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	246,091,000	246,091,000	126,483,350	0	126,483,350	51.4	119,607,650

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I : 01 **BADAN URUSAN ADMINISTRASI**
WILAYAH/PROVINSI : null **SUMATERA UTARA**
SATUAN KERJA : 098739 **PENGADILAN NEGERI SIBOLGA**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lrp : LRA.B.S.1
 Tanggal : 22/07/24 10:20 AM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_bel_sgo_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO			
1									
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	68,000,000	68,000,000	66,363,475	0	66,363,475	8=5/4	9=4-7	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	151,260,000	151,260,000	25,546,000	0	25,546,000	97.59	1,636,525	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	465,351,000	465,351,000	218,392,825	0	218,392,825	46.93	246,958,175	
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	64,810,000	64,810,000	39,888,400	0	39,888,400	61.55	24,921,600	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,300,000	6,300,000	0	0	0	0	6,300,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	71,110,000	71,110,000	39,888,400	0	39,888,400	56.09	31,221,600	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	1,414,846,000	1,414,846,000	683,040,154	0	683,040,154	48.28	731,805,846	
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	5,056,997,000	5,056,997,000	2,922,600,898	735	2,922,600,163	57.793	2,134,396,837	
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 986	5,056,997,000	5,056,997,000	2,922,600,898	735	2,922,600,163	57.79	2,134,396,837	
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01	5,056,997,000	5,056,997,000	2,922,600,898	735	2,922,600,163	57.79	2,134,396,837	
	JUMLAH BELANJA	5,056,997,000	5,056,997,000	2,922,600,898	735	2,922,600,163	57.79	2,134,396,837	

LAPORAN KINERJA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA TAHUN ANGGARAN 2024

PERIODE 30 JUNI 2024

KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 SATUAN KERJA : (98739) PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

KODE	KEGIATAN	BELANJA			KELUARAN				KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	SATUAN	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6986	DUKUNGAN MANAJEMEN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN PENGADILAN								
6986.EBA	LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL								
6986.EBA.994	LAYANAN PERKANTORAN								
51	BELANJA PEGAWAI	3,642,151,000	2,239,560,744	61,49	564,931,184	584,282,640		1,034	
52	BELANJA BARANG	1,414,846,000	683,040,154	48,28	105,895,956	89,166,937		(8,42)	
SUBTOTAL		5,056,977,000	2,922,600,898	57,79	670,827,140	673,449,577		1,003	
PENYESUAIAN (REVISI DIPA/PENGEMBANGAN ALIAN BELANJA/DLL)									
TOTAL		5,056,977,000	2,922,600,898	57,79	670,827,140	673,449,577		1,003	

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210
Telepon: 021-5758965, 45, 64, 48 Fax: 021-5700914



INFORMASI VIRTUAL ACCOUNT

MAHKAMAH AGUNG (005)
BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01)
PENGADILAN NEGERI SIBOLGA (098739)
Rekening Induk : RKK BUA MA OPS (032901xxxxx304)
Virtual Account : 653250987391000 | BPG-106 PN SIBOLGA BADAN URUSAN ADM
Periode : 01-06-2024 s/d 30-06-2024

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-06-03	16:23:41	31491322	Pengantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang. 241061301001627000001	0,00	0,00	23.999.000,00	23.999.000,00	SPAN	
2024-06-07	11:07:03	31602858	REGULAR_65325_0987391000	23.999.000,00	23.999.000,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
2024-06-13	09:19:09	31737609	Pembayaran Belanja Barang berupa Honorarium Pengelola Keuangan Bulan April dan Mei 2024 untuk 6 cran241061301001855000001	0,00	0,00	6.794.000,00	6.794.000,00	SPAN	
2024-06-14	08:13:00	31767732	653250987391000	6.794.000,00	0,00	5.922.000,00	12.716.000,00	BRIVA	
2024-06-14	11:07:22	31778421	REGULAR_65325_0987391000	12.716.000,00	12.716.000,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
Total Mutasi				36.715.000,00	36.715.000,00	36.715.000,00	0,00		
Saldo Akhir							0,00		

MEMO PENYESUAIAN

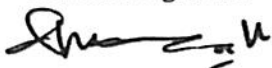
Kementerian Negara/Lembaga : Mahkamah Agung RI
 Esolen I : (01) Badan Urusan Administrasi
 Wilayah : (0700) Sumatera Utara
 Satuan Kerja : (098739) Pengadilan Negeri Sibolga
 No. Dokumen : 001/Jurnal Manual
 Tanggal Dokumen : 02-01-2024
 Tahun Anggaran : 2024
 Keterangan : Jurnal manual atas koreksi kesalahan jurnal penyesuaian khusus belanja pengiriman surat dinas pos pusat

Kategori Jurnal Penyelesaian

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima di Muka | <input type="checkbox"/> Koreksi Antar Beban |
| <input type="checkbox"/> Pendapatan yang Masih Harus Diterima | <input type="checkbox"/> Pendapatan selisih Kurs Belum Terealisasi |
| <input type="checkbox"/> Belanja Dibayar di Muka | <input type="checkbox"/> Beban selisih Kurs Belum Terealisasi |
| <input type="checkbox"/> Belanja yang Masih Harus dibayar | <input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Panjang |
| <input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang | <input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Pendek |
| <input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang | <input type="checkbox"/> Transfer Masuk |
| <input type="checkbox"/> Penyusutan Aset | <input type="checkbox"/> Transfer Keluar |
| <input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Penerimaan | <input type="checkbox"/> Reklasifikasi Neraca |
| <input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Pengeluaran | <input checked="" type="checkbox"/> Koreksi |
| <input type="checkbox"/> Persediaan | |

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN NAMA AKUN	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	635.000	
	K	391119	Koreksi Lainnya		635.000

Dibuat Oleh :
Bendahara Pengeluaran



Dhona Wahyuni, S.I.P.
Tanggal : 02 Januari 2024



Disetujui :
Sekretaris

Esron Ginting, S.H.
Tanggal : 02 Januari 2024

Direkam :
Operator Modul GLP



Mika Surya Sitohang, A.Md.
Tanggal : 02 Januari 2024

JURNAL MANUAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PERIODE : 2024-01

KEMENTERIAN : 005 MAHKAMAH AGUNG
 ESELON 1 : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH/PROPINSI : 0700 Sumatera Utara
 SATUAN KERJA : 098739 PENGADILAN NEGERI SIBOLGA
 JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

Tanggal : 03-06-2024
 Halaman : 1

TGL JURNAL	NO DOKUMEN	DESKRIPSI	COA	NO AKUN	KAS / AKRUAL	DEBET	KREDIT	VALIDASI
02-01-2024	001/Jurnal manual	Jurnal manual atas koreksi kesalahan jurnal penyesuaian khusus belanja pengiriman surat dinas pos pusat	098739.106.391119.0050100.0000000.0000000000.00000.2.0756.2.000000.00000	391119	AKRUAL	0	635,000	Sudah
02-01-2024	001/Jurnal manual	Jurnal manual atas koreksi kesalahan jurnal penyesuaian khusus belanja pengiriman surat dinas pos pusat	098739.106.521114.0050100.0000000.0000000000.00000.2.0756.2.000000.00000	521114	AKRUAL	635,000	0	Sudah
						635,000	635,000	

SURAT PERNYATAAN PERSEDIAAN BELUM DIREGISTER

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ESRON GINTING, SH
NIP : 197001251993031007
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Pada Pengadilan Negeri Sibolga

Menyatakan persediaan yang belum diregister pada laporan keuangan per 30 Juni 2024 . merupakan pencatatan BAST pada modul komitmen di bulan Juni yang belum dilakukan pertanggungjawaban pada modul pembayaran ataupun pendetailan pada modul persediaan. Kemudian pada bulan Juli BAST tersebut dihapuskan dikarenakan belum ada tindaklanjut pergantian GUP revolving, sementara dibulan Juni sudah tervalidasi posting otomatis atas semua transaksi termasuk pencatatan BAST persediaan di modul komitmen, sehingga muncul persediaan belum register dibulan 6, nanti dibulan 7 persediaan belum register tersebut telah hilang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

29 Juli 2024

Kuasa Pengguna Anggaran

Esron Ginting,SH

197001251993031007